

KESENJANGAN DISTRIBUSI PENDAPATAN RUMAHTANGGA PERTANIAN PADI DI PEDESAAN JAWA TENGAH.

SRI MARWANTI

(Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis, Fakultas Pertanian. UNS)

ABSTRACT

Used of data bases SUSENAS-KM 2001 in Central Java, this research aims to analysis discrepancy distribution of agriculture of paddy in rural household income. Discrepancy indikator used gini ratio and persentil measured with World Bank Criteria. The result of the research shows discrepancy distribution of agriculture household income is low on low of rural prosperity rate agriculture of paddy household.

Key words : *Gini Ratio, World Bank Criteria*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, strategi pembangunan yang diprioritaskan pada pemerataan hasil pembangunan dimulai sejak PELITA III. Strategi ini ditempatkan sebagai prioritas pertama dari trilogi pembangunan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia harus dapat dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan hasil-hasil yang dicapai harus dapat dinikmati secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia. Tujuan tersebut ditetapkan berkaitan dengan semakin timpangnya distribusi pendapatan penduduk pada periode pembangunan sebelumnya yang menempatkan prioritas pertama pada pertumbuhan dan mengakibatkan kesenjangan baik kesenjangan antar wilayah, kesenjangan antar sektor maupun kesenjangan antar manusia.

Dalam prioritas pemerataan pembangunan, kebijakan pembangunan makin diarahkan pada peran aktif masyarakat melalui tiga arah baru pembangunan nasional yaitu (1) pemberdayaan masyarakat (2) pemantapan otonomi dan (3) modernisasi melalui perubahan struktur masyarakat. Arah baru

pembangunan nasional ini diharapkan dapat menghadapi tantangan kesenjangan dan memantapkan upaya penanggulangan kesenjangan.

Distribusi pendapatan penduduk oleh BPS didekati dengan menilai distribusi pengeluaran penduduk hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) dengan rasio gini. Hasil SUSENAS (BPS& UNDP, 2001) menunjukkan adanya penurunan rasio gini pengeluaran rumahtangga Indonesia antara tahun 1976 ke tahun 1990 sebesar 0,03 yaitu dari 0,35 menjadi 0,32, yang berarti distribusi pendapatan semakin merata selama tahun 1976-1990. Tetapi pada tahun 1990- 1996, terjadi peningkatan rasio gini 0,04 dari 0,32 menjadi 0,36, yang berarti semakin besar kesenjangan distribusi pendapatan. Pada tahun 1996, penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah menerima 20,20 persen bagian pendapatan.

Kesenjangan distribusi pendapatan wilayah pedesaan lebih rendah dari pada wilayah perkotaan yang ditunjukkan oleh angka rasio gini yang lebih kecil di pedesaan (BPS& UNDP, 2001; BPS, 2001). Penurunan rasio gini lebih besar ditentukan oleh perbaikan distribusi pendapatan di pedesaan. Keadaan di Jawa Tengah menunjukkan hasil yang sedikit lebih

merata, dalam tahun 1976-1996 terjadi penurunan rasio gini 0,02 dari 0,31 menjadi 0,29. Pada tahun 1996, penduduk dengan pendapatan 40 persen terendah menerima 22,70 persen bagian pendapatan.

Meskipun sektor pertanian memberikan sumbangan yang besar dalam menciptakan kesempatan kerja dan pendapatan kepada masyarakat, tetapi modernisasi pertanian lebih menguntungkan pelaku kegiatan ekonomi pertanian yang lebih mampu sehingga menambah masalah kesenjangan antar golongan masyarakat di sektor pertanian di pedesaan (Sumodiningrat, 1999). Pendapatan masyarakat di sektor pertanian di pedesaan tergolong terendah dan diantara masyarakat di sektor pertanian yang pendapatannya terendah adalah buruh tani dan petani gurem (BPS, 2001).

Perdesaan Jawa Tengah sebagian besar penduduknya di sektor pertanian dengan rata-rata penguasaan lahan sempit dan diusahakan untuk tanaman pangan terutama padi (BPS, 1995; BPS, 2000). Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang bertujuan untuk menyajikan kesenjangan distribusi pendapatan rumahtangga pertanian padi di pedesaan Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data dasar SUSENAS 2001 dari BPS. Sampel rumahtangga pertanian padi di pedesaan diperoleh melalui seleksi sampel SUSENAS-KM 2001 Jawa Tengah dengan hasil seleksi berjumlah 1998 sampel rumahtangga pertanian padi. Data pengeluaran rumahtangga dalam SUSENAS digunakan sebagai ukuran tidak langsung dari pendapatan rumahtangga karena data pengeluaran yang dilaporkan oleh responden melebihi tingkat pendapatan sehingga *underestimation* pendapatan lebih tinggi dari pada pengeluaran (BPS, 2002).

Untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan dapat didekati

dengan beberapa cara pengukuran seperti pengukuran dispersi, persentil atau desil, indeks atau rasio. Pengukuran dispersi dengan menggunakan standar deviasi atau koefisien variasi. Pengukuran persentil atau desil dengan menggunakan kurve Lorenz. Pengukuran indeks atau rasio dengan menghitung indeks gini, indeks Kuznet, indeks Oshima (Yotopoulos & Nugent, 1976; Sujono, 1978; Sujono & Birowo, 1982; Kuncoro, 1997). Kesenjangan distribusi pendapatan antar golongan masyarakat di Indonesia diukur dengan menggunakan kriteria rasio gini dan ukuran persentil kriteria Bank Dunia (BPS & UNDP, 2001).

Rasio gini bernilai antara nol (kemerataan sempurna) dan satu (kesenjangan sempurna). Semakin tinggi nilai rasio gini berarti semakin tinggi kesenjangan distribusi pendapatannya atau semakin tidak merata. Angka rasio gini semakin kecil berarti semakin rendah kesenjangan distribusi pendapatan atau semakin merata.

Kriteria Bank Dunia mendasarkan penilaian distribusi pendapatan atas bagian pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Kesenjangan distribusi pendapatan digolongkan (a) tinggi bila 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima kurang dari 12 persen bagian pendapatan (b) sedang bila 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima 12-17 persen bagian pendapatan dan (c) rendah bila 40 persen penduduk berpendapatan terendah menerima lebih 17 persen bagian pendapatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rata-rata rumahtangga pertanian pedesaan memiliki jumlah anggota rumahtangga 3,91 jiwa terdiri laki-laki 1,99 jiwa dan perempuan 1,92 jiwa seperti tersaji pada table 1. Hal ini berarti bahwa dalam setiap 100 rumahtangga pertanian pedesaan, terdapat anggota rumahtangga

yang berjumlah 391 jiwa yang terdiri 199 laki-laki dan 192 perempuan. Hasil ini berbeda dengan komposisi penduduk Jawa Tengah menurut jenis kelamin dengan jumlah penduduk perempuan lebih besar dari penduduk laki-laki.

Rata-rata rumahtangga pertanian memiliki anggota yang tergolong usia kerja (usia ≥ 10 tahun) sebesar 3,26 jiwa yang berarti dalam 100 rumahtangga pertanian pedesaan terdapat 326 jiwa tergolong tenaga kerja potensial yang dapat diberdayakan untuk pembangunan ekonomi pedesaan. Jumlah anggota usia kerja merupakan tenaga kerja yang tersedia di setiap rumahtangga pertanian yang dinilai sudah mampu berkontribusi menghasilkan barang dan jasa dalam perekonomian.

Namun tidak semua tenaga kerja menyediakan waktunya untuk berpartisipasi memperoleh penghasilan bagi rumahtangga karena memilih menyelesaikan pendidikan bagi tenaga kerja muda, mengurus rumahtangga bagi para istri atau anak perempuan, mengasuh anak-anak atau pensiun bagi tenaga kerja usia lanjut. Bagian tenaga kerja rumahtangga yang berpartisipasi memperoleh penghasilan tergolong angkatan kerja, sedangkan yang memilih tidak berpartisipasi memperoleh penghasilan tergolong bukan angkatan kerja seperti masih sekolah, mengurus rumahtangga.

Jumlah angkatan kerja per rumahtangga pertanian pedesaan sebanyak

2,23 jiwa yang menunjukkan jumlah tenaga kerja yang ditawarkan pada berbagai kegiatan ekonomi produktif. Angkatan kerja yang telah memperoleh kesempatan bekerja sebanyak 2,13 jiwa. Hal ini berarti dalam 100 rumahtangga pertanian pedesaan, terdapat 213 orang angkatan kerja yang telah bekerja dan ada 10 orang yang masih menganggur.

Pengeluaran rumahtangga pertanian sebagai proksi dari pendapatan rumahtangga yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi kelompok makanan dan pengeluaran konsumsi kelompok bukan makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, pakaian, barang tahan lama dan aneka barang yang lain. Persentase pengeluaran untuk makanan dapat menjadi petunjuk tingkat kesejahteraan rumahtangga pertanian. Semakin tinggi tingkat pendapatan rumahtangga pada umumnya semakin rendah persentase pengeluaran untuk kelompok makanan. Besarnya pengeluaran rumahtangga pertanian per bulan Rp 402.580,- yang dikeluarkan untuk konsumsi makanan Rp 271.642,- dan konsumsi bukan makanan Rp 130.938,-. Persentase pengeluaran untuk kelompok makanan 69,40 persen dan bukan makanan 30,60 persen. Hasil ini menjadi petunjuk bahwa tingkat pendapatan rumahtangga pertanian tergolong rendah karena sebagian besar pengeluaran untuk konsumsi makanan, bahkan lebih besar dari angka untuk pedesaan Jawa Tengah (BPS, 2002).

Tabel 1. Karakteristik Rumahtangga Pertanian Pedesaan Jawa Tengah tahun 2001.

	Uraian	Rata-rata
1	Jumlah anggota rumahtangga (jiwa)	3,91
	- anggota laki-laki (jiwa)	1,99
	- anggota perempuan (jiwa)	1,92
2	Jumlah anggota usia kerja/tenaga kerja (jiwa)	3,26
3	Jumlah angkatan kerja (jiwa)	2,23
4	Jumlah anggota yang bekerja (jiwa)	2,13
5	Pengeluaran rumahtangga per bulan (ribu rupiah)	402,58
	- pengeluaran untuk makanan (%)	69,40
	- pengeluaran untuk bukan makanan (%)	30,60

Sumber: Analisis data dasar SUSENAS-KM 2001 Jawa Tengah

Distribusi rumahtangga pertanian menurut golongan pengeluaran dapat menjadi petunjuk struktur pendapatan masyarakat tani pedesaan. Pengeluaran rumahtangga digolongkan menjadi 9 golongan pengeluaran dengan distribusi rumahtangga pertanian menurut golongan pengeluaran seperti tersaji pada table 2. Distribusi pengeluaran per kapita dari

rumahtangga pertanian berada dari golongan terendah kurang Rp 40.000,- sebanyak 0,2 persen dan tertinggi lebih Rp 500.000,- sebesar 0,4 persen . Frekuensi terbesar rumahtangga memiliki pengeluaran antara Rp 100.000,- sampai Rp 149.999,- sebesar 684 rumahtangga (34,2 persen).

Tabel 2. Distribusi rumahtangga menurut golongan pengeluaran per kapita

No.	Gol. pengeluaran/kap/bln	Jumlah Rumahtangga	Prosentase Rumahtangga
1	<40,00 ribu	3	0,2
2	40,00-59,99 ribu	127	6,4
3	60,00-79,99 ribu	379	18,9
4	80,00-99,99 ribu	525	26,3
5	100,00-149,99 ribu	684	34,2
6	150,00-199,99 ribu	199	9,9
7	200,00-299,99 ribu	62	3,1
8	300,00-499,99 ribu	14	0,7
9	>= 500,00 ribu	5	0,4
	Jumlah	1.998	100,0

Sumber: Analisis data dasar SUSENAS-KM 2001 Jawa Tengah

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dari rumahtangga pertanian sebesar Rp 109.955,-. Rata-rata pengeluaran perkapita golongan berpendapatan rendah sebesar Rp 73.684,- per bulan sedangkan yang berpendapatan tinggi sebesar Rp 184.022,- seperti tersaji pada table 3. Menggunakan pengeluaran Rp 76.148,-/kapita/bulan sebagai batas kemiskinan di pedesaan Jawa Tengah (BPS, 2002), terdapat 25 persen anggota rumahtangga pertanian tergolong miskin.

Dalam kondisi keterbatasan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sebagian besar penghasilan akan dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan prioritas untuk memenuhi kebutuhan makanan. Pola ini konsisten ditunjukkan oleh hasil-hasil SUSENAS sebelumnya mengikuti hukum Engel yang menyatakan bahwa proporsi penghasilan yang dialokasikan untuk membeli makanan

akan menurun seiring dengan peningkatan penghasilan seperti ditunjukkan hasil analisis pada table 3 (Nicholson, 1995; BPS, 2001a; 2002).

Pengeluaran rumahtangga pertanian terbagi diantara kelompok 40 persen rumahtangga pertanian berpendapatan rendah yang menikmati 31,46 persen pengeluaran total sehingga kesenjangan distribusi pendapatannya tergolong rendah karena 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati total pendapatan lebih 17 persen sesuai criteria Bank Dunia. Angka rasio gini 0,13 juga tergolong rendah (lebih kecil 0,4) yang berarti distribusi pendapatan rumahtangga pertanian pedesaan Jawa Tengah relative merata. Distribusi pengeluaran rumahtangga sebagai proksi distribusi pendapatan rumahtangga pertanian pedesaan di Jawa Tengah seperti tersaji pada table 4.

Tabel 3 . Rata-rata Pengeluaran menurut Golongan Pendapatan.

No	Golongan Pendapatan	Rata-rata pengeluaran per rumah tangga/bln (Rp)	Rata-rata pengeluaran per kapita/bln (Rp)	Persentase pengeluaran untuk makanan (%)
1	Rendah (40%)	334.637	73.684	72,15
2	Menengah (40%)	404.099	109.145	69,93
3	Tinggi (20%)	535.261	184.022	62,84
Total	Seluruh sampel	402.579	109.955	69,40

Sumber: Analisis data dasar SUSENAS-KM 2001 Jawa Tengah.

Keterangan : Rp 76.148,- /kapita/bulan sebagai batas kemiskinan di perdesaan Jawa Tengah, 2001.

Tabel 4. Persentase Pembagian Pendapatan dan Rasio Gini Rumahtangga Pertanian Padi.

Persentase rumah tangga dengan pendapatan	Bagian Pendapatan yang diterima (%)	Rasio Gini	Kesenjangan Distribusi Pendapatan
40 persen terendah	31,46	0,13	Berdasar criteria Bank Dunia dan rasio gini tergolong rendah
40 persen menengah	37,77		
20 persen tertinggi	31,77		
Jumlah	100,00		

Sumber: Analisis data dasar SUSENAS-KM 2001 Jawa Tengah.

Berdasar dua indikator kesenjangan distribusi pendapatan tersebut pada table 4, nampak bahwa pendapatan rumahtangga pertanian relative merata tetapi berdasar indikator kesejahteraan pada table 3 menunjukkan relative meratanya pendapatan rumahtangga pertanian pada tingkat kesejahteraan yang rendah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan rumahtangga pertanian sebagian besar masih digunakan untuk membiayai konsumsi makanan yang menjadi indikator masih rendahnya tingkat kesejahteraan rumahtangga pertanian. Namun kesenjangan distribusi pendapatan tergolong rendah yang berarti pendapatan rumahtangga pertanian relative merata pada tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Upaya peningkatan pendapatan rumahtangga pertanian menjadi lebih prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan

rumahtangga yang mengemban fungsi untuk memproduksi pangan pokok bagi masyarakat dan menjaga ketahanan pangan.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS (1995a), *Sensus Pertanian 1993: Sensus Sampel Rumahtangga Pertanian Pengguna Lahan*, Biro Pusat Statistik Jakarta.
- BPS (1995b), *Sensus Pertanian 1993: Analisis Profil Rumahtangga Pertanian*, Biro Pusat Statistik Jakarta
- BPS (2000a), *Statistik Kesejahteraan Rakyat 1999*, Survey Sosial Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Jakarta.

- BPS (2000b), *Sensus Penduduk 2000: Statistik Potensi Desa Propinsi Jawa Tengah 2000*, Badan Pusat Statistik Jakarta.
- BPS (2001), *Statistik Indonesia 2000*, Badan Pusat Statistik Jakarta.
- BPS (2002), *Statistik Indonesia 2001*, Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Ghatak and Ingersent (1984), *Agriculture and Economic Development*, Harvester Press, Sussex
- Kuncoro, M (1997), *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta
- Masyhuri (1999), "Kebijakan Pembangunan Pertanian", *Agro Ekonomi* IV (2): 71-78.
- Nicholson, W (1978), *Microeconomic Theory: Basic Principles and Extension*, Second Edition, The Dryden Press Hinsdale Illinois.
- Simanjuntak, P (1985), *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit FE Universitas Indonesia.
- Sumodiningrat, G (1999), 'Pembangunan Pertanian Dalam Ekonomi Kerakyatan, Otonomi Daerah dan Persaingan Global' Makalah Seminar Pembangunan Pertanian Pada Milenium III, Fak. Pertanian UGM Yogyakarta.
- Sujono, I dan Birowo, AT, 1982. Distribusi Pendapatan di Pedesaan Padi Sawah di Jawa Tengah dalam Sajogyo, *Bunga Rampai Perekonomian Desa*, Yayasan Obor Indonesia.
- Todaro MP (1989), *Economic Development in the Third World*, Longman Inc New York.
- Widodo, S (2000), 'Rural Transformation in Indonesia' *Agro Ekonomi* VII (Juni): 30-37.
- Yotopoulos, P.A and Nugent, JB (1976), *Economics of Development, Empirical Investigation*, Harper and Row Publisher, Inc. New York.

KAJIAN PENDAPATAN DAN KEMISKINAN
RUMAHTANGGA PEDESAAN MISKIN DI JAWA TENGAH

SUPRPTI SUPARDI dan SRI MARWANTI

(Staf Pengajar Jurusan/Program Studi Sosial Ekonomi Pertanian/Agrobisnis, Fakultas
Pertanian UNS)

ABSTRACT

Distributing poverty in rural Central Java consist various area of various nature resource potensial with proportion of poverty village is 28.71 persen. The research aims to analysis income and poverty household in poor rural Central Java with purposive location research. The result of the research shows more than half of household is agriculture household that get bigger income from non agriculture and porr population classified.

Key words : Agriculture and non agriculture income, poverty rate

PENDAHULUAN

Kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia diarahkan pada peran aktif masyarakat melalui tiga arah baru pembangunan nasional yaitu (1) pemberdayaan masyarakat (2) pemantapan otonomi dan (3) modernisasi melalui perubahan struktur masyarakat (Sumodiningrat.G, 1999). Arah baru pembangunan nasional ini diharapkan dapat menghadapi tantangan kesenjangan dan memantapkan upaya penanggulangan kemiskinan.

Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan pembangunan berdampak pada menurunnya angka kemiskinan di Indonesia (BPS& UNDP, 2001; BPS, 2001), tetapi krisis ekonomi tahun 1997-1998 mengakibatkan upaya pengentasan kemiskinan menghadapi tantangan yang lebih besar karena meluasnya kemiskinan akibat krisis. Meluasnya kemiskinan berarti semakin besar jumlah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar.

Kemiskinan di pedesaan ditemui pada buruh tani tak berlahan, petani nyaris tak berlahan dan petani gurem (Cahyono, 1983) dan kemiskinan pedesaan tercermin dari kondisi rumahtangga pertanian yang tidak mampu memenuhi

kebutuhan minimum untuk hidup layak, baik pangan maupun non pangan (Chung& Oh, 1992). Sebagian besar pendapatan rumahtangga miskin masih digunakan untuk pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh anggota rumahtangga dan hanya sebagian kecil yang dapat dialokasikan untuk non pangan.

Pemerataan pembangunan telah menghasilkan penurunan angka rasio gini yang menunjukkan adanya penurunan kesenjangan distribusi pendapatan. Kesenjangan distribusi pendapatan wilayah pedesaan lebih rendah dari pada wilayah perkotaan yang ditunjukkan oleh angka rasio gini yang lebih kecil di pedesaan dari pada di perkotaan, tetapi angka kemiskinan pedesaan lebih tinggi dari pada di perkotaan (BPS& UNDP, 2001; BPS, 2001).

Penyebaran kemiskinan di pedesaan Jawa Tengah meliputi berbagai daerah dengan potensi sumberdaya alam yang beragam meliputi dataran rendah pantai selatan, lahan kering pegunungan, bukit kapur, lahan kering dataran rendah, pinggiran hutan-perkebunan dan pinggiran hutan-lahan kering (BPS, 2002). Desa dan kelurahan di Jawa Tengah berjumlah 8.495, yang berstatus desa miskin mencapai 28,71 persen dan status desa tidak miskin 71,29 persen yang

tersebar di 29 wilayah kabupaten dan 4 kodya (selain kodya Surakarta dan Magelang).

Tulisan ini merupakan bagian hasil penelitian RUKK IV/1- 2003 dengan tujuan mengkaji ragam pendapatan dan tingkat kemiskinan rumahtangga di perdesaan miskin Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di enam wilayah kecamatan dan kabupaten yang mewakili keragaman potensi sumberdaya alam yakni: Pracimantoro (Wonogiri) sebagai wilayah bukit kapur, Ambal (Kebumen): wilayah dataran rendah pantai selatan, Kalibening (Banjarnegara): wilayah lahan kering pegunungan, Subah (Batang): wilayah lahan kering pinggiran hutan-perkebunan, Kedungjati (Grobogan): wilayah lahan kering pinggiran hutan dan Sumber (Rembang): wilayah lahan kering dataran rendah.

Dari masing-masing kecamatan dipilih satu desa secara *purposive* dengan criteria termasuk desa miskin yang ditetapkan Bappenas. Jumlah desa miskin di masing-masing kecamatan sampel adalah (a) Pracimantoro: 11 desa atau 61,11 persen (b) Ambal: 19 desa atau 59,37 persen (c) Kalibening: 16 desa atau 66,67 persen (d) Subah : 22 desa atau 88 persen (e) Kedungjati: 10 desa atau 83,33 persen (f) Sumber: 13 desa atau 72,22 persen. Sampel desa miskin meliputi desa (a) Gambirmanis (b) Sumberjati (c) Kasinoman (d) Pecalungan (f) Prigi (g) Kedungtulup.

Rumahtangga sampel ditentukan dengan cara *cluster sampling* dengan mengambil 1 wilayah RW atau dusun dari masing-masing desa miskin. Semua rumah tangga dalam wilayah RW atau dusun terpilih diwawancarai secara sensus dengan menggunakan kuesioner yang telah dipersiapkan. Jumlah rumahtangga sampel di 6 dusun/ desa sebanyak 404 rumahtangga terinci (a)

Gambirmanis: 72 (b) Sumberjati: 63 (c) Kasinoman: 72 (d) Pecalungan: 75 (f) Prigi: 64 (g) Kedungtulup: 58. Data sekunder diperoleh dari instansi terkait maupun nara sumber lainnya.

Pendapatan rumahtangga diperhitungkan dari seluruh pendapatan yang diperoleh rumahtangga dari berbagai ragam sumber pendapatan yang terinci pendapatan dari pertanian dan non pertanian selama satu tahun. Pendapatan dari pertanian meliputi pendapatan dari usahatani tanaman pangan & tanaman keras, usaha temak dan buruh tani, sedangkan pendapatan non pertanian meliputi pendapatan luar pertanian, dan pendapatan lainnya.

Penilaian kemiskinan rumahtangga menggunakan garis kemiskinan Sayogya tahun 1982 yaitu dengan menggunakan ukuran pendapatan setara nilai tukar beras (NTB) 360 kg per kapita per tahun untuk batas sangat miskin dan 480 kg per kapita per tahun untuk batas miskin. Patokan harga beras pada waktu penelitian Rp 2.200,- per kilogram. Analisis data menggunakan metode statistic diskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Rumahtangga pedesaan miskin di Jawa Tengah rata-rata memiliki jumlah anggota rumahtangga lebih 4 jiwa, pendidikan suami(KK) lebih tinggi dari pada istri dengan lama sekolah kurang 6 tahun, sebagian besar rumahtangga memiliki rumah dan lahan usahatani (*kuli kenceng*). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar rumahtangga pedesaan miskin adalah rumahtangga pertanian. Usaha pertanian berbasis lahan sawah, tegal dan pekarangan yang diusahakan untuk tanaman pangan, tanaman keras dan temak. Rata-rata jumlah anggota rumahtangga, pendidikan suami (KK) dan status rumahtangga menurut potensi sumberdaya alam tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Rata-rata Jumlah Anggota Rumahtangga, Pendidikan suami (KK) dan Status Rumahtangga menurut Potensi Sumber Daya Alam Desa Miskin Jawa Tengah, 2003.

No.	Potensi SDA Desa Miskin	Kabupaten Sampel	Rata-rata Jml anggr. rt (jiwa)	Pend. KK (th)	Kuli Kenceng % rt
1.	Bukit kapur	Wonogiri	5,0	5,1	90,3
2.	Dataran rendah pantai	Kebumen	4,7	5,1	90,5
3.	Lhn kering pegunungan	Banjarnegara	4,5	5,9	88,9
4.	Pinggiran hutan-	Batang	4,4	6,3	58,7
5.	perkebunan	Grobogan	4,7	4,6	68,8
6.	Lhn kering pinggiran hutan Lhn kering dataran rendah.	Rembang	4,4	4,2	72,4

Sumber : Hasil Analisis Data Primer.

Rumahtangga desa miskin di pinggiran hutan negara dan perkebunan memiliki rata-rata jumlah anggota rumahtangga terkecil dan prosentase rumahtangga pertanian terendah sedangkan yang tertinggi ditemui pada rumahtangga desa miskin di bukit kapur dan dataran rendah pantai. Lahan kering (tegal) merupakan potensi sumberdaya alam utama di desa miskin, meskipun lahan sawah tadah hujan juga dimiliki oleh rumahtangga desa miskin di Rembang, Batang dan Grobogan. Rata-rata luas penguasaan lahan sawah 1.025 meter persegi, lahan tegal 3.200 meter persegi dan pekarangan 386 meter persegi.

Pendapatan rumahtangga miskin bersumber dari pertanian dan non

pertanian yang beragam sumbangannya dari masing-masing wilayah. Sumbangan non pertanian lebih besar dari pada pertanian di Wonogiri, Kebumen dan Batang, sebaliknya di Banjarnegara, Grobogan dan Rembang. Rata-rata pendapatan rumahtangga di desa miskin tahun 2003 sebesar Rp 5.875.458,- yang disumbang dari pekerjaan di sektor pertanian 47,0 persen dan non pertanian 53,0 persen. Pendapatan dari pertanian terdiri dari pendapatan usahatani 35,9 persen dan buruh tani 11,1 persen. Besarnya pendapatan dan sumbangan pertanian menurut lapangan pekerjaan masing-masing wilayah desa miskin tersaji pada Tabel 2.

Tabel 2 Rata-rata Pendapatan Rumahtangga dan Sumbangan Pertanian menurut Potensi Sumber Daya Alam Desa Miskin Jawa Tengah, 2003.

No	Kabupaten Sampel	Rata-rata Pendapatan (Rupiah/tahun)	Sumbangan Pertanian (%)	Sumbangan Usahatani (%)	Sumbangan Buruh tani (%)
1	Wonogiri	6.713.750	47,5	41,7	5,8
2	Kebumen	5.305.835	31,5	26,8	4,7
3	Banjarnegara	5.250.203	70,0	63,1	6,9
4	Batang	6.550.169	26,1	23,1	3,0
5	Grobogan	6.344.566	51,3	28,4	22,9
6	Rembang	4.839.623	63,9	33,5	30,4
	Rerata	5.875.458	47,0	35,9	11,1

Sumber : Hasil Analisis Data Primer.

Rumahtangga desa miskin di bukit kapur (desa Gambirmanis, Pracimantoro, Wonogiri) memiliki pendapatan yang tertinggi, sedangkan rumahtangga desa miskin di lahan kering dataran rendah (Rembang) memiliki pendapatan terendah. Ragam sumber pendapatan rumahtangga di pedesaan miskin meliputi pendapatan dari usahatani tanaman pangan dan tanaman keras, usaha ternak, buruh tani, pekerjaan luar pertanian, dan sumber lainnya. Tanaman pangan biasa diusahakan di lahan sawah dan tegal, sedangkan tanaman keras biasa diusahakan di lahan tegal dan pekarangan. Usaha ternak meliputi ternak ruminansia, ternak kecil maupun ternak unggas. Pendapatan buruh tani adalah pendapatan yang diperoleh dari upah mengerjakan lahan usaha orang lain atau lahan perhutani/perkebunan. Pendapatan dari luar pertanian meliputi pendapatan dari buruh

non pertanian, usaha bakulan/dagang, gaji pegawai negeri/TNI/pensiunan, industri rumahtangga (mencari kayu ke hutan dan membuat arang), kenek, sopir, makelar dan jasa lainnya. Sumber lain berupa remiten (kiriman) dari anggota keluarga. Sumbangan masing-masing ragam sumber pendapatan terhadap pendapatan rumahtangga di desa miskin seperti tersaji pada table 3. Sumbangan terbesar pendapatan rumahtangga di desa miskin berasal dari pekerjaan luar pertanian yang dilakukan didalam desa maupun di luar desa miskin terutama di wilayah pinggiran hutan dan perkebunan (Batang) dan dataran rendah pantai (Kebumen) yang bersumber dari industri emping dan gula merah, perdagangan dan jasa. Sumbangan pendapatan dari pertanian lebih besar di desa miskin lahan kering pegunungan (Banjarnegara) terutama dari usahatani hortikultura dan tanaman keras.

Tabel 3. Ragam Pendapatan dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Rumahtangga Pedesaan Miskin di Jawa Tengah , 2003.

No. Sumber Pendapatan	Rerata Pendapatan (Rupiah/tahun)	Sumbangan (%)
1. Pertanian		
a. Usahatani tan.pangan &keras	1.513.753	25,8
b. Usaha ternak	597.811	10,1
c. Buruh pertanian	650.287	11,1
2. Luar pertanian	2.926.857	49,8
3. Lainnya	186.753	3,2
Jumlah	5.875.428	100,

Sumber: Hasil Analisis data primer

Pekerjaan luar pertanian memberikan sumbangan terbesar terhadap rata-rata-rata pendapatan rumahtangga di pedesaan miskin yaitu sebesar 49,8 persen. Pertanian menyumbang pendapatan yang lebih kecil dari luar pertanian dengan perincian dari usahatani tanaman pangan dan tanaman keras 25,8 persen, usaha ternak 10,1 persen, buruh pertanian 11,1 persen.

Rendahnya sumbangan pendapatan dari usahatani tanaman pangan dan tanaman keras antara lain disebabkan sempitnya penguasaan lahan serta rendahnya potensi produksi lahan

pertanian, sehingga upaya untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga antara lain ditempuh dengan mencari peluang kerja di luar usahatani (buruh tani dan pekerjaan luar pertanian).

Sebagian besar rumahtangga dan anggota rumahtangga di pedesaan miskin tergolong rumahtangga miskin atau penduduk miskin dengan tingkat pendapatan per kapita per tahun kurang 480 kg nilai tukar beras, bahkan hampir setengah rumahtangga tergolong sangat miskin dengan tingkat pendapatan per kapita per tahun kurang 360 kg nilai tukar beras seperti tersaji pada table 4. Rata-

rata harga beras di desa miskin pada waktu penelitian Rp 2.200,- per kilogram.
Tabel 4. Tingkat Kemiskinan Penduduk dan Rata-rata Pendapatan Per Kapita Rumahtangga Miskin menurut Potensi Sumber Daya Alam Desa Miskin Jawa Tengah, 2003.

No.	Kabupaten Sampel	Penduduk sangat miskin (%) < 360 kg NTB	Pendapatan NTB penduduk sangat miskin (kg/th)	Penduduk miskin (%) <480 kg NTB	Pendapatan NTB penduduk miskin (kg/th)
1.	Wonogiri	43,3	284	64,5	326
2.	Kebumen	58,0	231	68,7	268
3.	Banjarnegara	61,7	236	79,8	280
4.	Batang	49,2	261	70,2	317
5.	Grobogan	38,8	282	54,5	319
6.	Rembang	58,0	164	70,4	211
	Rerata	51,6	223	68,4	287

Sumber : Hasil Analisis Data Primer.

Keterangan NTB= Nilai tukar beras dengan harga Rp 2.200,-/kg.

Dengan criteria garis kemiskinan nilai tukar beras 360 kg/kapita per tahun, terdapat 51,6 persen penduduk sangat miskin yang berada dalam 46,3 persen rumahtangga sangat miskin di pedesaan miskin dengan rata-rata pendapatan per kapita sebesar nilai tukar beras 223 kg/kapita/tahun. Dengan criteria nilai tukar beras 480 kg/kapita per tahun, terdapat 68,4 persen penduduk miskin yang berada dalam 53,7 persen rumahtangga miskin di pedesaan miskin dengan rata-rata pendapatan per kapita sebesar nilai tukar beras 287 kg/kapita/tahun. Angka kemiskinan tertinggi di Banjarnegara (desa Kasinoman, kecamatan Kalibening) karena pendapatan terbesar dari usahatani, sedangkan pada saat penelitian harga

berbagai produk pertanian hortikultura yang diusahakan sangat rendah baik di tingkat usahatani maupun di pasar local.

Rumahtangga tidak sangat miskin mencapai 53,7 persen meliputi 48,4 persen penduduk tidak sangat miskin dengan rata-rata pendapatan per kapita sebesar nilai tukar beras 875 kg/kapita/tahun. Rumahtangga tidak miskin sebesar 37,4 persen meliputi 31,6 persen penduduk miskin dengan rata-rata pendapatan per kapita sebesar nilai tukar beras 1.088 kg/kapita/tahun. Prosentase rumahtangga dan anggota rumahtangga tidak miskin yang tertinggi di kabupaten Grobogan (desa Prigi, kecamatan Kedungjati) karena sumbangan yang besar dari pendapatan luar usahatani meliputi buruh tani, pendapatan luar pertanian dan remiten.

Tabel 5. Rata-rata Pendapatan Per Kapita Rumahtangga Tidak Miskin menurut Potensi Sumber Daya Alam Desa Miskin Jawa Tengah, 2003.

No.	Kabupaten Sampel	Penduduk tdk sangat miskin (%) ≥ 360 kg NTB	Pendapatan NTB penduduk tdk sangat miskin (kg/th)	Penduduk tdk miskin (%) ≥480 kg NTB	Pendapatan NTB penduduk tdk miskin (kg/th)
1.	Wonogiri	56,7	917	35,5	1.122
2.	Kebumen	42,0	799	31,3	937
3.	Banjarnegara	38,3	810	20,2	1.093
4.	Batang	50,8	1.052	29,8	1.434
5.	Grobogan	61,2	829	45,5	943
6.	Rembang	58,0	846	29,6	996
	Rerata	48,4	875	31,6	1.088

Sumber : Hasil Analisis Data Primer.

Keterangan NTB= Nilai tukar beras dengan harga Rp 2.200,-/kg.

Rata-rata pendapatan rumahtangga desa miskin yang semakin tinggi tidak selalu sejalan dengan angka kemiskinan yang semakin rendah karena menyembunyikan permasalahan distribusi pendapatan diantara penduduknya. Keadaan ini terlihat dari hasil penelitian yang menunjukkan, rumahtangga pedesaan miskin di Wonogiri dengan rata-rata pendapatan tertinggi memiliki angka kemiskinan yang lebih tinggi dari rumahtangga pedesaan miskin di Grobogan.

SIMPULAN DAN SARAN

Rumahtangga pedesaan miskin memiliki jumlah anggota rumahtangga lebih banyak dari rumahtangga pedesaan, terdiri suami, istri dan 3 anak dan anggota lainnya dengan rata-rata lama sekolah suami kurang dari 6 tahun dan sebagian besar rumahtangga pedesaan miskin merupakan rumahtangga pertanian. Sebagian besar rumahtangga pedesaan memperoleh pendapatan terbesar dari luar pertanian dengan sumbangan dan ragam sumber pendapatan luar pertanian yang berbeda antar wilayah.

Sebagian besar rumahtangga di pedesaan miskin tergolong miskin dengan tingkat kemiskinan penduduk yang lebih besar karena jumlah anggota rumahtangga miskin lebih besar dari pada rumahtangga tidak miskin. Pedesaan miskin dengan rata-rata pendapatan rumahtangga yang tertinggi tidak selalu sejalan dengan tingkat kemiskinan yang terendah seperti ditunjukkan oleh rumahtangga pedesaan miskin di Wonogiri dan Grobogan.

DAFTAR PUSTAKA

Amang,B. 1994. Pembahasan Pengembangan Sistem Pangan Untuk Pemerataan dalam Sapuan dan Silitonga (eds) *Pembangunan Pertanian Dalam Menanggulangi Kemiskinan*. Prosiding Seminar Perhepi Jakarta.

BPS. 1995. *Daftar Nama dan Indeks Peta Desa Tertinggal Menurut dan Kecamatan, Propinsi- propinsi di Pulau Jawa dan Madura 1995*. Jakarta.

BPS. 2001. *Statistik Indonesia 2000*. Jakarta.

BPS. 2002. *Jawa Tengah Dalam Angka 2001*. Semarang

BPS& UNDP. 2001. *Indonesia. Laporan Pembangunan Manusia 2001*. Jakarta.

Cahyono,BT. 1993. *Pengembangan Kesempatan Kerja*. BPFE Yogyakarta.

Chung,K.W& Oh,N.W. 1992. Rural Poverty In The Republic of Korea: Trends and Policy Issue. *Asian Development Review* Vol 10 (1): 91-124.

Faturochman dan Molo,M. 1995. *Kemiskinan dan Kependudukan Di Pedesaan Jawa, Analisis Data Susenas 1992*. PPK-UGM Yogyakarta

Sumodiningrat, G (1999), *Pembangunan Pertanian Dalam Ekonomi Kerakyatan, Otonomi Daerah dan Persaingan Global* Masalah Seminar Pembangunan Pertanian Pada Milenium III, Fak. Pertanian UGM Yogyakarta.

White,B. 1996. Optimisme Makro, Pesimisme Mikro: Penaksiran Kemiskinan dan Ketimpangan di Indonesia, 1967-1987 dalam Sitorus dkk (Penyunting). *Memahami dan Menanggulangi Kemiskinan di Indonesia Prof. Dr. Sajogyo 70 Tahun*. Gramedia Jakarta.